

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan, bisa disimpulkan bahwa fenomena ketidakpatuhan pengusaha angkot terhadap standar kelayakan kendaraan yang tercantum dalam Permenhub Nomor 30 Tahun 2020 disebabkan oleh:

- a. Tidak adanya pendapatan yang diakibatkan oleh persaingan antara pengusaha angkot dengan transportasi *online*;
- b. Keterbatasan pengawasan pemerintah serta penurunan kesadaran pengusaha angkot untuk melakukan uji KIR yang merupakan alat bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi kondisi angkot di Kota Bandung;
- c. Penegakkan aturan yang tidak efektif, akibat dari tidak adanya biaya bagi pengusaha angkot untuk mendorong terjadinya kepatuhan.

#### **5.2. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk menanggulangi fenomena ketidakpatuhan pengusaha angkot yang di antaranya adalah membentuk Badan Usaha Daerah pada angkot yang dikelola langsung oleh Dishub Kota Bandung, dengan tujuan untuk mempermudah Dishub Kota Bandung melakukan perbaikan sistem di dalam badan usaha angkot di Kota Bandung. Agar tidak terjadi konflik pengelolaan antara pengusaha angkot dengan Dishub Kota Bandung, pengelolaan ini sendiri tetap melibatkan berbagai pengusaha angkot yang sudah ada, untuk mengelola angkot tersebut. Untuk mempermudah pengelolaan, setiap jurusan angkot yang ada di kota Bandung bisa ditunjuk seorang ketua yang bisa memiliki otoritas untuk mengelola angkot pada jurusan-jurusan yang dikelola oleh ketua tersebut.

Untuk manajemen perusahaan, Dishub Kota Bandung bisa menunjuk orang-orang yang bisa mengelola keuangan perusahaan dengan baik, sehingga tidak ada uang yang disalahgunakan oleh pihak mana pun. Kemudian, dalam BUMD Angkot ini, bisa disiapkan sebuah sistem agar penumpang bisa membayar angkot dengan

sistem non-tunai menggunakan kartu *e-money*, yang diharapkan bisa mempermudah pembayaran penumpang, serta menghindari terjadinya penumpang tidak bayar. Tarif yang digunakan untuk setiap penumpang yang hendak menggunakan angkot menjadi 5000 rupiah, yang sebelumnya hanya 2000 rupiah, dengan tujuan agar biaya operasional bisa tertutup, serta mendapat keuntungan yang bisa digunakan untuk memberikan layanan yang lebih baik, seperti terminal angkot yang lebih baik dan bersih. Terakhir, Dishub Kota Bandung perlu melakukan kampanye untuk meningkatkan keinginan masyarakat menggunakan angkot, sehingga diharapkan bisnis angkot bisa berjalan dengan baik, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Kota Bandung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriansyah. (2015). *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*. Jakarta  
Pusat: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- bandung.go.id. (2022, Maret 16). *Transportasi*. Diambil kembali dari  
[bandung.go.id: https://www.bandung.go.id/etalase/4/transportasi](https://www.bandung.go.id/etalase/4/transportasi)
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concept, and Models of Public Policy Making (5th Edition)*. New York: Routledge.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*. London: SAGE.
- Data Bandung Bergerak. (2021, Agustus 3). *Perkembangan Jumlah Angkutan Publik di Kota Bandung 2005-2020*. Diambil kembali dari  
[public.flourish.studio:  
https://public.flourish.studio/visualisation/6905081/?utm\\_source=showcase&utm\\_campaign=visualisation/6905081](https://public.flourish.studio/visualisation/6905081/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/6905081)
- Dinas Perhubungan Kota Bandung. (2021, Februari). *Data Informasi Publik Dinas Perhubungan Kota Bandung*. Diambil kembali dari  
[ppid.bandung.go.id: https://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2021/03/DIP%20202021/DIP%20-%20DINAS%20PERHUBUNGAN.pdf](https://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2021/03/DIP%20202021/DIP%20-%20DINAS%20PERHUBUNGAN.pdf)
- Dinas Perhubungan Kota Bandung. (2023, Desember 21). *Dinas Perhubungan Kota Bandung*. Diambil kembali dari [dishub.bandung.go.id:](https://dishub.bandung.go.id/)  
<https://dishub.bandung.go.id/>
- Flowers, P., Smith, J. A., & Larkin, M. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. London: SAGE Publications Ltd.
- golali.com. (2021, Oktober 14). *Rute Angkot Tegalega - Cisitu*. Diambil kembali  
dari Golali.com: <https://www.golali.com/rute-angkot-tegalega-cisitu>

- Hammersley, M. (2013). *What is Qualitative Research?* London: Bloomsbury Academy.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. London: British Library.
- Honig, M. I. (2006). *New Direction in Education Policy Implementation*. Albany: State University of New York.
- IGI Global. (2015). *Handbook of Research on Emerging Developments in Data Privacy*. New York: IGI Global. Diambil kembali dari igi-global.com.
- King, S. K., & Sheffrin, S. (2002). Tax Evasion and Equity Theory: An Investigative Approach. *International Tax and Public Finance*, 505-521.
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Essex: Pearson Education Limited.
- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. (2007). *Public Policy Analysis*. Bristol: The Policy Press.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2021). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives (Seventh Edition)*. Thousand Oaks: CQ Press.
- Larsen, H. G. (2023). *Eight Domains of Phenomenology and Research Methods*. Oxon: Routledge.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Mihalcea, M. (2021). *The Equity Theory - John Stacey Adams*. Diambil kembali dari scribd.com: <https://www.scribd.com/doc/152102718/John-Stacey-Adams>
- Nurmufidin, I. (2023, Desember 15). Wawancara Sekretaris Organda. (A. Nugraha, Pewawancara)

Organda. (2023, Desember 21). *Organda*. Diambil kembali dari organda.or.id:

<https://www.organda.or.id/>

Paudel, N. R. (2010). A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsider. *Journal Political Science*, -.

Pemerintah Daerah Jawa Barat. (2021, Agustus 10). *Dorong Penggunaan Transportasi Umum, Dishub Tingkatkan Kualitas Pelayanan*. Diambil kembali dari jabarprov.go.id:  
[https://jabarprov.go.id/index.php/news/43851/Dorong\\_Penggunaan\\_Transportasi\\_Umum\\_Dishub\\_Tingkatkan\\_Kualitas\\_Pelayanan#:~:text=Sementara%20itu%2C%20Kepala%20UPT%20Angkutan,sebanyak%2036%20trayek%20yang%20beroperasi](https://jabarprov.go.id/index.php/news/43851/Dorong_Penggunaan_Transportasi_Umum_Dishub_Tingkatkan_Kualitas_Pelayanan#:~:text=Sementara%20itu%2C%20Kepala%20UPT%20Angkutan,sebanyak%2036%20trayek%20yang%20beroperasi).

Pemerintah Republik Indonesia. (2020, Mei 22). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Powell, M. (2018). *An Analysis of Policy Implementation in the Third World*. New York: Routledge.

Sabatier, P. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 21-48.

Silverman, M. G. (2008). *Compliance Management for Public, Private, or Nonprofit Organizations*. New York: McGraw-Hill.

Stahl, N. A., & King, J. R. (2020). Expanding Approach for Research: Understanding and Using Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Development Education*, 26-28.

Stone, D. (2012). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (Third Edition)*. New York: W.W. Norton & Company Inc.

- Vagle, M. D. (2018). *Crafting Phenomenological Research (Second Edition)*. New York: Routledge.
- Weaver, R. K. (2015). Getting People to Behave: Research Lessons for Policy Makers. *Public Administration Review*, 806-816.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice (6th Edition)*. New York: Routledge.